



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian



# RENCANA STRATEGIS PPPPTK PERTANIAN 2015 - 2019

(Revisi 2018)

Jl. Raya Jangari km. 14 Sukajadi, Karangtengah,  
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian Tahun 2015 - 2019. Renstra ini merupakan rencana jangka menengah (lima tahun) menuju kepada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berdasarkan Gotong Royong”* yang selaras dengan visi PPPPTK Pertanian *“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan pelatihan dalam membentuk Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang professional dan bermartabat serta berdaya saing global”*.

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dijiwai agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita). Diantara sembilan agenda Nawa Cita, terdapat dua hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, yaitu pembangunan pendidikan (Nawa Cita 5 dan Nawa Cita 8) dan pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi (Nawa Cita 2).

Renstra ini akan ditinjau setiap tahun dan direvisi sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai serta perkembangan yang terjadi, agar selalu mutakhir dan tetap menuju kepada pencapaian Visi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Pertanian memerlukan proses, kerja keras serta komitmen semua pihak untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Semoga, Rencana Strategis 2015 – 2019 ini dapat dipahami dan menjadi pedoman bagi unit kerja serta seluruh pegawai PPPPTK Pertanian.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis PPPPTK Pertanian ini.

Cianjur, Desember 2018  
Kepala PPPPTK Pertanian,

Dr. Ir. Raden Ruli Basuni, MP  
NIP. 196307201990011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Bagan	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Paradigma Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan	5
D. Kondisi Umum	7
E. Tantangan dan Permasalahan 5 tahun Kedepan	12
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PPPPTK PERTANIAN</b>	<b>15</b>
A. Visi PPPPTK Pertanian	15
B. Misi PPPPTK Pertanian	16
C. Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian	19
D. Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian	20
E. Tata Nilai PPPPTK Pertanian	21
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>23</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi PPPPTK Pertanian	23
B. Kerangka Regulasi	27
C. Kerangka Kelembagaan	29
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>31</b>
A. Target Kinerja	31
B. Kerangka Pendanaan	33
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PTK pada SMK yang Menyelenggarakan Program Keahlian Pertanian, Perikanan dan Teknik Kimia	8
Tabel 1.2.	Jumlah Peserta Diklat Berdasarkan Sasaran	9
Tabel 1.3.	Capaian Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PPPPTK Pertanian sampai dengan Tahun 2014	9
Tabel 1.4.	Jumlah Bahan Ajar/Modul/Buku Teks Siswa	10
Tabel 2.1.	Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian tahun 2015 – 2019	21
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P1	23
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P2	23
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Penanggungjawab Lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	29
Tabel 3.2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPPPTK Pertanian	30
Tabel 3.3	Kerangka Regulasi	31
Tabel 4.1.	Target Kinerja Sasaran Strategis 1 PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019	35
Tabel 4.2.	Target Kinerja Sasaran Strategis 2 PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019	36
Tabel 4.3.	Perkiraan Kebutuhan Anggaran PPPPTK Pertanian 2015—2019 (dalam Rp. Juta)	37

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi PPPPTK Pertanian	30
Bagan 4.1.	Penjaminan dan Peningkatan Mutu	35

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan seluruh masyarakat; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin; dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar program dan kegiatan serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, pada periode 2015—2019 yang merupakan tahapan ke tiga RPJPN difokuskan pada penyiapan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, telah ditetapkan arah pembangunan 2015—2019 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Untuk mewujudkan itu, maka Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015 — 2019 adalah membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang diarahkan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul. Selanjutnya RPJMN 2015—2019 telah menetapkan

*Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang diarahkan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul*

**Norma Pembangunan RPJMN 2015—2019**

Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berpedoman pada itu, dengan melalui proses penyusunan dan penyajian rencana strategis (Renstra) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun dan menetapkan Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Selanjutnya, dengan adanya Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), maka PPPPTK Pertanian memiliki landasan yang kuat untuk menyusun Renstra Tahun 2015—2019 sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon 1.

Renstra PPPPTK Pertanian Tahun 2015—2019 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi PPPPTK Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen GTK dan Kemendikbud, memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan PPPPTK Pertanian dalam menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan secara tahunan dalam periode pembangunan tahun 2015—2019.

Sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen GTK, maka Renstra PPPPTK Pertanian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Renstra ini diharapkan mampu menuntun program unit kerja di PPPPTK Pertanian dalam pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga menjadi pedoman dalam menyusun:

(1) Program kerja unit unit kerja internal; (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (4) Penetapan Kinerja (PK); (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra PPPPTK Pertanian 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Landasan Filosofis Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian, Analisis Kondisi Umum serta Tantangan Kedepan;
- BAB II** : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, berisi rumusan Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian;
- BAB III** : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN, berisi Arah Kebijakan dan Strategi PPPPTK Pertanian yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan;
- BAB IV** : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN, berisi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen GTK selama periode perencanaan;
- BAB IV** : PENUTUP, berisi simpulan singkat mengenai dokumen Renstra.

## B. Landasan Hukum

Reformasi hukum dalam bidang pendidikan seluruhnya mengacu kepada amanat reformasi dalam amandemen Undang-undang dasar 1945, yang selanjutnya dijabarkan kedalam undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang melandasi penyusunan Renstra PPPPTK Pertanian ini. Secara rinci landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015—2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
15. Permendikbud Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### C. Paradigma Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa paradigma baik yang bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa, maupun bersifat nasional sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Mengacu pada Renstra Kemendikbud serta Renstra Ditjen GTK Tahun 2015 – 2019, maka Renstra PPPPTK Pertanian disusun berdasarkan paradigma sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Memenuhi amanat konstitusi tersebut, PPPPTK Pertanian sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Ditjen GTK memiliki peran untuk memenuhi hak guru dalam mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses oleh setiap guru. Peran penting PPPPTK Pertanian tersebut adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua.

#### 2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Untuk mendukung proses pendidikan tersebut, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan diselenggarakan dengan sistem terbuka yang dapat diakses oleh semua guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari tugas PPPPTK Pertanian antara lain berupa penyiapan sistem pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk terus belajar sepanjang hayatnya.

### **3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan**

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warganegara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Untuk mendukung pendidikan sebagai suatu gerakan, maka PPPPTK Pertanian berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan.

### **4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar**

Penyelenggaraan pendidikan berkewajiban memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar harus mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik. Untuk menghasilkan pembelajar, maka PPPPTK Pertanian berperan dalam mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi, kreatifitas dan inovasi yang dapat memotivasi anak didik menjadi insan pembelajar.

### **5. Pendidikan Membentuk Karakter**

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian dengan karakter unggul, antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Peran PPPPTK Pertanian dalam mewujudkan karakter unggul tersebut melalui penguatan guru sebagai *role model* dalam membentuk watak dan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi

manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik, melalui keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.

## **6. Sekolah yang Menyenangkan**

Sekolah sebagai satuan pendidikan utama yang merupakan suatu ekosistem, di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut, PPPPTK Pertanian berperan mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan sekolah yang kondusif melalui penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin para pelaku pendidikan untuk membuat sekolah yang efektif.

## **7. Pendidikan Membangun Kebudayaan**

Pendidikan memiliki hubungan sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, PPPPTK Pertanian sebagai UPT dibawah koordinasi Ditjen GTK berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan membangun budaya kerja sesuai standar kinerja yang diharapkan, melalui berbagai program dan kegiatan.

### **D. Kondisi Umum**

#### **D.1. Kondisi Internal**

Kondisi internal dipaparkan adalah kondisi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, meliputi peningkatan kompetensi PTK, peningkatan mutu SDM PPPPTK Pertanian, dan pengembangan bahan ajar/modul.

## 1) Peningkatan kompetensi PTK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menyelenggarakan program keahlian bidang pertanian, Perikanan dan Teknik kimia di Indonesia adalah 3.734 sekolah, sedangkan jumlah PTK yang ada berjumlah 11.447 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah PTK pada SMK yang Menyelenggarakan Program Keahlian Pertanian, Perikanan dan Teknik Kimia**

No	Jenis PTK	Jumlah (orang)
1	Guru Produktif bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi	5.077
2	Guru Produktif bidang keahlian perikanan	940
3	Guru Produktif bidang keahlian teknik kimia	669
4	Guru Dasar bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi (Fisika, Kimia, Biologi)	5701
5	Tenaga Kependidikan:	
	a. Kepala Sekolah	3.734
	b. Tenaga Administrasi	10.311
	c. Tenaga Laboratorium	3.734
	d. Tenaga Perpustakaan	1.718
	e. Teknisi	6.874
	<b>TOTAL</b>	<b>38.758</b>

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian sasaran Renstra (Tabel 1.1), jumlah PTK produktif pertanian, kimia dan teknisi yang telah mengikuti diklat adalah 796 orang, atau sejumlah 0,002 % dari jumlah PTK. Jumlah guru pembelajar SD Jawa Barat dan NTB yang telah mengikuti diklat KK (kelompok kompetensi) 1 adalah 32.923 orang dan KK 2 adalah 36.532 orang.

**Tabel 1.2. Jumlah Peserta Diklat Berdasarkan Sasaran Renstra 2015-2017**

NO	PAKET DIKLAT	TAHUN			JUMLAH
		2015	2016	2017	
1	Produktif (Budidaya Tanaman, Budidaya Perikanan, NPL, Alat Mesin Pertanian, Budidaya Ternak, Teknologi Hasil Pertanian)		596		596
2	Tenaga Administrasi/ Laboran/ Teknis Perpustakaan		200		200
3	Guru pembelajar SD KK 1		32.923		32.923
4	Guru pembelajar SD KK 2		36.532		36.532
	<b>JUMLAH</b>		<b>70.251</b>		<b>70.251</b>

## 2) Peningkatan Mutu SDM PPPPTK Pertanian

Peningkatan mutu SDM PPPPTK Pertanian dilakukan melalui peningkatan kualifikasi dengan memberikan beasiswa untuk mengikuti peningkatan jenjang pendidikan atau melalui peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat, magang, seminar serta melalui kegiatan melakukan ujicoba proses produksi serta pengembangan inovasi.

Capaian peningkatan mutu SDM berdasarkan jenjang pendidikan pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**  
**Capaian Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PPPPTK Pertanian sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017**

1	Peningkatan Kualifikasi	Tahun (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	1. SLTA ke S-1	0	0	0	0	0
	2. S-1 ke S-2	1	1	0	1	0
	3. S-2 ke S-3	1	2	2	2	0
2	<b>Peningkatan Kompetensi (Diklat/magang/sertifikasi)</b>	-	100	3	2	
3	<b>Uji coba produksi/inovasi (paket)</b>	-	-	-	10	1

Jumlah SDM secara keseluruhan adalah 245 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strata 3 : 5 orang
- b. Strata 2 : 92 orang
- c. Strata 1 : 76 orang
- d. Diploma 4 : 4 orang
- e. Diploma 3 : 4 orang
- f. SMA : 70 orang
- g. SMP : 3 orang
- h. SD : 5 orang

## 3) Pengembangan bahan ajar/modul

Jumlah bahan ajar/modul yang telah berhasil disusun hingga periode Renstra 2015-2017 adalah 130 modul program guru pembelajar dan 130 modul keahlian ganda, Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Bahan Ajar/Modul/Guru Pembelajar/Keahlian Ganda**

No	Pengembangan Bahan Ajar/Modul, Guru pembelajar	Jumlah modul/ bahan ajar	Keahli an Ganda	Sistem GP	Model
<b>A. Bahan Ajar/Modul</b>					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	10	9	-
2	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	10	10	4	-
3	Agribisnis Tanaman Perkebunan	10	10	10	-
4	Kesehatan Hewan	10	10	9	-
5	Agribisnis Ternak Ruminansia	10	10	9	-
6	Agribisnis Ternak Unggas	10	10	8	-
7	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	10	10	10	-
8	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	10	10	10	-
9	Agribisnis Aneka Ternak	10	10	8	-
10	Mekanisasi Pertanian	10	10	10	-
11	Teknik Produksi Hasi Hutan	10	10	10	-
12	Budidaya Perikanan	10	10	10	-
13	Pedagogik	10	10	10	-
14	Biologi (Agrobisnis)	10	-	-	-
15	Biologi (Perikanan dan Kelautan)	10	-	-	-
16	Fisika (Agrobisnis)	10	-	-	-
17	Fisika (Perikanan dan Kelautan)	10	-	-	-
18	Kimia (Agrobisnis)	10	-	-	-
19	Kimia (Perikanan dan Kelautan)	10	-	-	-
20	Kimia Analisis	10	-	-	-
21	Kimia Industri	10	-	-	-
22	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	10	-	-	-
23	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	10	-	-	-
24	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	10	-	-	-
25	Teknik Produksi Hasil Hutan	10	-	-	-
26	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	10	-	-	-
		<b>260</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	-
<b>B. Teknik Tanah dan Air</b>					
	<b>Program keahlian Ganda</b>	<b>Jumlah Buku</b>	<b>KG</b>	<b>Jumlah Paket</b>	
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	-	-	
2	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	10	-	-	
3	Agribisnis Tanaman Perkebunan	10	-	-	
4	Kesehatan Hewan	10	-	-	
5	Agribisnis Ternak Ruminansia	10	-	-	
6	Agribisnis Ternak Unggas	10	-	-	
7	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	10	-	-	
8	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	10	-	-	
9	Agribisnis Aneka Ternak	10	-	-	
10	Mekanisasi Pertanian	10	-	-	
11	Teknik Produksi Hasi Hutan	10	-	-	
12	Budidaya Perikanan	10	-	-	
13	Pedagogik	10	-	-	
	Jumlah	130			

Data di atas merupakan “kekuatan” lembaga yang dapat dijadikan modal dasar dalam mengemban tugas dan fungsinya. Selain hal tersebut diatas kekuatan yang dimiliki oleh PPPPTK Pertanian adalah pengalaman melakukan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang baik untuk diklat PTK bidang pertanian, diklat pedagogik bagi guru Sekolah Dasar, Diklat Pasca UKG maupun diklat bagi persiapan purna tugas dari berbagai instansi.

PPPPTK Pertanian sebagai lembaga diklat kejuruan, penyelenggaraan diklatnya sangat diwarnai dengan kegiatan-kegiatan praktek dilapangan dan atau di laboratorium. Kegiatan praktek ini sangat ditunjang oleh kegiatan produktif di lapangan, baik kegiatan uji coba produksi maupun kegiatan pengembangan inovasi teknologi. Namun saat ini kegiatan produktif dilapangan banyak mengalami kendala yang disebabkan beberapa hal, antara lain adalah semakin berkurangnya tenaga teknisi lapangan sebagai akibat dari berkembangnya SDM yang semula teknisi (lulusan SMP/SMA/SMK) saat ini sudah berpendidikan S-1 dan S-2, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan lapangan serta semakin berkurangnya minat untuk melakukan kegiatan produktif dilapangan. Hal ini merupakan “kelemahan” lembaga yang harus segera diatasi.

#### D.2. Kondisi Eksternal

Dalam menjalankan tugas pokok, PPPPTK Pertanian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi eksternal, baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruh negatif. Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan “peluang” bagi PPPPTK Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya. Peluang tersebut antara lain adalah:

- Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- Belum semua satuan pendidikan memiliki tenaga kependidikan yang memadai seperti pustakawan, tenaga laboratorium, Kepala sekolah yang berlisensi kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi pengawas.
- Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau serta mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan
- Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat, yang merupakan “ancaman” bagi PPPPTK Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

- Disatu sisi anggaran pendidikan semakin meningkat yaitu menjadi 20 % dari APBN, tetapi kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru. Kepala sekolah dan Pengawas namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang significant terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
- Otonomi yang luas kepada daerah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK-nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

#### E. Tantangan dan Permasalahan 5 tahun Kedepan

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan harus diatasi dalam melaksanakan

pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan lima tahun kedepan meliputi :

#### A. Permasalahan

- 1) Rata-rata nilai hasil UKG Nasional tahun 2015 adalah 56 sedangkan target UKG Nasional pada tahun 2019 adalah 80.
- 2) Keberadaan komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah belum merata.
- 3) Belum adanya komunitas guru adaptif terapan bidang keahlian pertanian di setiap daerah.
- 4) Distribusi kualitas dan kuantitas Guru masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya pendidikan yang bermutu belum dapat dinikmati masyarakat di daerah yang jauh dari kota.
- 5) Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kemampuan Guru belum optimal.
- 6) Pembinaan Guru di sekolah secara parsial ditangani oleh unit kerja yang berbeda di lingkungan Kemendikbud.
- 7) Peran PPPPTK Kejuruan dalam pembinaan Guru untuk bidang kejuruan semakin kecil dikarenakan mengikuti program prioritas Nasional.
- 8) Kelebihan guru adaptif sebagai dampak penyempurnaan kurikulum 2013

#### B. Tantangan

- 1) Perkembangan capaian peningkatan kompetensi guru produktif pertanian dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 sasaran sebanyak 74.881 guru. Berdasarkan 3 moda (Moda tatap muka, Moda dalam jaringan, Moda kombinasi pada tahun 2016 baru dilakukan sebanyak 248 guru (TM), Tahun 2017 akan dilakukan PKB sebanyak 1.000 guru dan Keahlian Ganda sebanyak 3.033 guru. Rencana 2018 sebanyak mata pelajaran produktif pertanian 13.200 guru, Keahlian ganda 2.500 guru. Pada Tahun 2019 mata pelajaran produktif pertanian sebanyak 14.400 guru dan Keahlian Ganda 2.500 guru.
- 2) Sertifikasi secara finansial telah meningkatkan ekonomi tenaga pendidik, namun belum sejalan dengan peningkatan kinerja dan kompetensi. Lima tahun kedepan dampak dari sertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan harus dijawab.
- 3) Implementasi KTSP Kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2017 menuntut perubahan perilaku guru dalam melakukan pembelajaran dari guru aktif menjadi siswa aktif. Perubahan tersebut memerlukan pembiasaan

secara berkala baik melalui pelatihan maupun pendampingan. oleh karena itu perlu upaya serius meningkatkan kompetensi pedagogik guru untuk menjawab keberhasilan implementasi KTSP Kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2017.

- 4) Perlu adanya Sosialisasi implementasi KTSP Kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2017.
- 5) Optimalisasi peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi KTSP Kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2017.
- 6) Lembaga pelaksana pemberdayaan PTK/PPPPTK perlu direvitalisasi dengan memperluas peran dan fungsi sampai menjangkau pembinaan sekolah sebagai satu kesatuan sistem peningkatan mutu.
- 7) Memenuhi komitmen global (*Millenium development goals, Education for all, dan Education for sustainable development*).
- 8) Adanya kebijakan pengembangan dan pemberdayaan PTK/PPPPTK yang berbasis pada kinerja.
- 9) Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal antar gender dan antar wilayah dengan pendekatan penerapan sistem manajemen mutu dalam peningkatan berkelanjutan (*Continous improvement*).
- 10) Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mampu bersaing secara global.
- 11) Peningkatan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha/industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
- 12) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
- 13) Adanya kebijakan yang mengintegrasikan muatan karakter bangsa. Kebanggaan warga Negara, peduli lingkungan dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 14) Adanya kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan.
- 15) Perlu adanya perbaikan dan penataan ulang ke dalam, baik dalam hal sumberdaya manusia (SDM) maupun fasilitas dan infrastruktur.
- 16) Kekurangan guru produktif terkait dengan adanya kebijakan rasio antara SMA dan SMK 40 berbanding 60 sebagai dampak dari Inpres no. 9 tahun 2016.

## BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PPPPTK PERTANIAN

### A. Visi PPPPTK Pertanian

PPPPTK Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen GTK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Permendikbud No. 16 Tahun 2015 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pertanian.

Visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

akan didukung oleh PPPPTK Pertanian, sehingga Visi yang ditetapkan oleh PPPPTK Pertanian untuk periode 2015 - 2019:

***“Terbentuknya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkarakter dan profesional serta berdaya saing global berlandaskan gotong royong dengan mempertimbangkan ekosistem pendidikan ”***

Berikut uraian penjelasan Visi PPPPTK Pertanian:

- Mutu pengelolaan berstandar nasional dengan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu, menggunakan standar Reformasi Birokrasi Internal yang selalu ditingkatkan secara terus menerus (*Continuous improvement*),
- Materi diklat Relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah serta mengandung muatan yang berkaitan dengan kesepakatan global,
- Akses layanan merata untuk seluruh wilayah/daerah di Indonesia,
- Tersedia bagi seluruh unsur pendidikan (PTK dan asosiasi profesi),
- Layanan dalam proses diklat dilakukan secara cepat, tepat dan memuaskan pelanggan.

## B. Misi PPPPTK Pertanian

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka Misi PPPPTK Pertanian tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan adalah:

- MP.1 Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian,
- MP.2 Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian,
- MP.3 Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme dibidang pendidikan dan pertanian,
- MP.4 Mewujudkansistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.

Makna dari setiap butir Misi diatas adalah sebagai berikut:

### **MP.1 Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian**

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan yang professional bidang adalah tugas pokok dari PPPPTK Pertanian, hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstandar berdasarkan kebutuhan kompetensi dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi.

### **MP. 2 Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pertanian yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga perlu peningkatan mutu dan relevansi layanan diklat. Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan mutu dan layanan diklat bidang pertanian adalah :

- 1) Diklat Modular. Layanan diklat dengan menggunakan modular ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan layanan yang disebabkan anggaran pemerintah yang belum mencukupi untuk menyentuh seluruh pendidik dan

tenaga kependidikan (PTK) yang ada saat ini. Diklat moduler ini terutama diperuntukkan bagi PTK yang memiliki hasil uji kompetensi “diatas standar minimal”, dimana calon peserta diklat akan diberikan modul-modul kompetensi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil uji kompetensi.

- 2) Program Pembentukan dan Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKKPS. Tahun 2011 telah dibentuk MGMP sejumlah 50 kelompok kerja MGMP kelompok guru produktif pada 50 Kabupaten/Kota.
- 3) Pengembangan sistem diklat. Dengan tersedianya sistem diklat diharapkan PPPPTK Pertanian dapat memberikan layanan diklat dengan model kerjasama dengan pemerintah daerah, dimana setiap daerah dapat menyelenggarakan diklatnya sendiri dengan memperhatikan dan mengikuti sistem diklat yang disusun oleh PPPPTK Pertanian serta standar yang telah ditetapkan oleh PPPPTK Pertanian. PPPPTK Pertanian bertekad akan terus memantapkan program-program tersebut sambil mencari bentuk-bentuk layanan diklat lain yang dapat mempercepat ketercapaian pemerataan dan perluasan akses layanan.

Suasana Asesmen Peserta Diklat Keahlian Ganda oleh asesor LSP PPPPTK Pertanian



Suasana Pelatihan Kepala Sekolah

### **MP.3 Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme di bidang pendidikan dan pertanian**

Sesuai dengan misi Kemdikbud, maka layanan diklat harus tersedia dan terjangkau secara merata diseluruh pelosok nusantara dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Agar layanan diklat dapat merata pada seluruh wilayah nusantara, maka PPPPTK Pertanian sebagai unit pelaksana teknis (PTK) dari lembaga pusat, akan terus berusaha mencari alternatif untuk memperluas akses layanan diklat yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara. Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses adalah :

- 1) Diklat jarak Jauh. Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah melakukan layanan diklat jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sasaran mencapai 2440 peserta.
- 2) Pengembangan workstation (perwakilan PPPPTK di daerah). Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah dilakukan pembentukan workstation di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Papua. Melalui workstation ini telah dilakukan sejumlah diklat dan pengembangan SMK yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian dengan menggunakan dana Pemerintah daerah (APBD).
- 3) Peningkatan kompetensi pendidik dengan metode daring (dalam jaringan) Guru Pembelajar (GP) yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2015 – 2016 dengan scope wilayah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

### **MP.4 Mewujudkan sistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan**

Pelayanan diklat yang prima bagi peserta diklat/pelanggan eksternal merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh PPPPTK Pertanian yang tertuang di dalam Visi. Pencapaian layanan yang prima bagi pelanggan eksternal harus dimulai dari pengembangan sistem tata kelola lembaga yang mengarah kepada pencapaian kinerja yang baik. PPPPTK Pertanian sebagai organisasi harus memiliki struktur dengan organ-organ yang relevan dengan pencapaian dari tujuan organisasi tersebut, baik organik formal sesuai dengan

ketetapan Permendiknas nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maupun organik yang dikembangkan sendiri untuk mewadahi pengembangan peran dan memperlancar proses pencapaian tujuan organisasi/lembaga. Selain pengembangan organisasi dan program-program yang dikembangkan sebagai bagian dari aspek teknis. aspek manusia juga terus dikembangkan.

### C. Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian

Untuk merealisasikan visi, PPPPTK Pertanian telah menetapkan dua tujuan strategis, agar dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dengan lebih jelas. Tujuan strategis ini pun berpedoman pada rumusan tujuan strategis Ditjen GTK 2015-2019. Tujuan strategis PPPPTK Pertanian tahun 2015-2019 yang diturunkan dari tujuan strategis Ditjen GTK 2015-2019, yaitu:

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian tahun 2015 – 2019**

DITJEN GTK		PPPPTK Pertanian	
KODE	TUJUAN STRATEGIS	KODE	TUJUAN STRATEGIS
TD.2	Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	T.P1	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian

Tujuan Strategis 1 PPPPTK Pertanian (TP.1): *Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian*, merupakan penjabaran untuk mendukung terwujudnya Misi 1 (*Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian*), Misi 2 (*Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian*) dan Misi 3 (*Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme di bidang pendidikan dan pertanian*) PPPPTK Pertanian.

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada ketersediaan guru yang bermutu, karena guru adalah inti dari proses pendidikan dan menjadi kunci utama mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem peningkatan kompetensi yang

menjamin meningkatnya *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge* yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme guru melalui: pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi guru dalam jabatan berbasis data dan hasil Uji Kompetensi Guru.

#### D. Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan strategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. PPPPTK Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2015 - 2019 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen GTK. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis PPPPTK Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen GTK yang sesuai dengan tugas dan fungsi PPPPTK. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P1 (*Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian*):

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P1**

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target akhir Renstra (2019)
SS1.P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya (pertanian)	IKK 1: Jumlah guru yang meningkat kompetensinya	198.577 orang
		IKK 2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	4.337 orang (KS PS)

Secara rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019**

Sasaran Strategis	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya						
<b>IKK 1: Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya</b>	orang	<b>11.432</b>	<b>162.485</b>	<b>31.114</b>	<b>38.667</b>	<b>815</b>
<b>IKK 2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya :</b>	Orang	<b>1.715</b>	<b>305</b>	<b>1.160</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>
1. Pengawas Sekolah		205	71	80	124	0
2. Kepala Sekolah		1.510	234	1.080	1.033	0

#### E. Tata Nilai PPPPTK Pertanian

Aspek manusia merupakan tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan motto bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya. Tata nilai yang telah dianut dan akan terus dipertahankan adalah “**versatile, dedicated and caring**”. Dalam rangka mencapai visi, maka PPPPTK Pertanian telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga sebagai berikut:

##### *Versatile:*

- Cakap : bekerja ikhlas, cerdas, berhasil dan tuntas
- Profesional : kompeten, jujur, menggandrungi keunggulan yang dimiliki

##### *Dedicated:*

- Loyal : konsisten terhadap pekerjaan
- Disiplin : tepat waktu dan taat peraturan
- Tanggung jawab : memiliki komitmen terhadap pekerjaan

##### *Caring*

- Peduli : tanggap terhadap kondisi, kebutuhan dan kepentingan lembaga, sesama dan masyarakat

Sejak penetapan Renstra periode 2015 – 2019, maka PPPPTK Pertanian sebagai UPT, berupaya menerapkan tata nilai utama Kemendikbud yang ditetapkan, sehingga dapat memandu seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sedang

dilaksanakan. Tata nilai PPPPTK Pertanian mengacu pada tata nilai Kemendikbud 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi PPPPTK Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 mengacu pada RPJMN 2015—2019, berdasarkan pada sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) untuk menuju Indonesia yang berdaulat, secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan agenda prioritas (NAWA CITA) tersebut, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. **Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.**
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.**
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. **Melakukan revolusi karakter bangsa.**
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Diantara sembilan agenda prioritas (NAWA CITA), terdapat dua hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tertuang dalam NAWA CITA 5 dan NAWA CITA 8; dan 2) pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi tertuang dalam NAWA CITA 2.



Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Ditjen GTK dan Kemendikbud serta agenda prioritas (NAWA CITA) tersebut, maka PPPPTK Pertanian merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis pada setiap Tujuan, yang dapat diuraikan berikut ini:

1. Arah Kebijakan dan strategi PPPPTK Pertanian untuk mencapai (SS1.P1) pada (TP.1) dalam mendukung (SSD.2) dari (T2) Renstra Ditjen GTK yaitu sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau *Continuing Professional Development (CPD)*
  - b) Peningkatan peran serta guru dalam penataan kurikulum melalui: (i) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (ii) penguatan praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah agar mampu melaksanakan kurikulum secara baik; dan (iii) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.
2. Arah kebijakan dan strategi PPPPTK Pertanian untuk mencapai (SS2.P2) pada (TD.2) dalam mendukung (SSD.4) dari (T4) Renstra Ditjen GTK yaitu sebagai berikut:

- a) menguatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPPPTK Pertanian melalui penguatan kelembagaan dan tatakelola reformasi birokrasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup PPPPTK Pertanian;
- b) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara: (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT), memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan quick wins pelayanan publik Ditjen GTK; dan (iii) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- c) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui: (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; dan (ii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembinaan guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai media;
- d) menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja PPPPTK Pertanian secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e) menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses PPPPTK Pertanian yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; dan (ii) penetapan *quick wins* penerapan *e-government*;
- f) menguatkan manajemen kinerja PPPPTK Pertanian yang dilaksanakan melalui: (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara; (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja; (iii)

penguatan pengendalian kinerja meliputi pemantauan dan evaluasi yang efektif dan terintegrasi.

Arah kebijakan PPPPTK Pertanian selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015—2019. Didalam Struktur kegiatan lingkup Ditjen GTK, bertanggung jawab atas Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Struktur kegiatan dan Unit Eselon II yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Penanggungjawab Lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Penanggungjawab		
Kode	Program/Kegiatan	Eselon I / Eselon II / UPT
13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PPPPTK/LPPKS/LPPPTK KPTK

Sumber: Renstra Ditjen GTK 2015 - 2019

Program Guru dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk mencapai:

1. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas;
2. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikdas;
3. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikmen;
4. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas, dikdas, serta dikmen;
5. peningkatan pengembangan karier, penghargaan, dan perlindungan serta kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan PAUD dan dikmas, dikdas, serta dikmen;
- 6. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan;**
7. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;
8. peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program PPPPTK Pertanian diuraikan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebagai salah satu UPT pada lingkup Ditjen GTK, maka SK dan IKK PPPPTK Pertanian dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPPPTK Pertanian**

KODE	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SS1.P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya	IKK.P1	<b>Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya</b>
			1) Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian
			2) Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik
			3) Guru yang Mengikuti Diklat Keahlian Ganda
		4) Guru yang Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013	
		IKK.P2	<b>Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya</b>
			1) Pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi
2) Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi			

## B. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan PPPPTK Pertanian. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan antara pusat dan daerah.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang terkait dengan Program Guru dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang

dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi.

Perincian mengenai jenis dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen GTK, menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh PPPPTK Pertanian serta menjadi pihak yang berkontribusi didalamnya. Mengacu pada Renstra Ditjen GTK, Kerangka Regulasi ini dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.3 Kerangka Regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Permendikbud tentang Pengelolaan Guru apabila PP nya telah disahkan	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru.
3	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.
4	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru, dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan.
5	Permendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya

Sumber: Renstra Ditjen GTK 2015 – 2019

### C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat PPPPTK Pertanian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi PPPPTK Pertanian; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

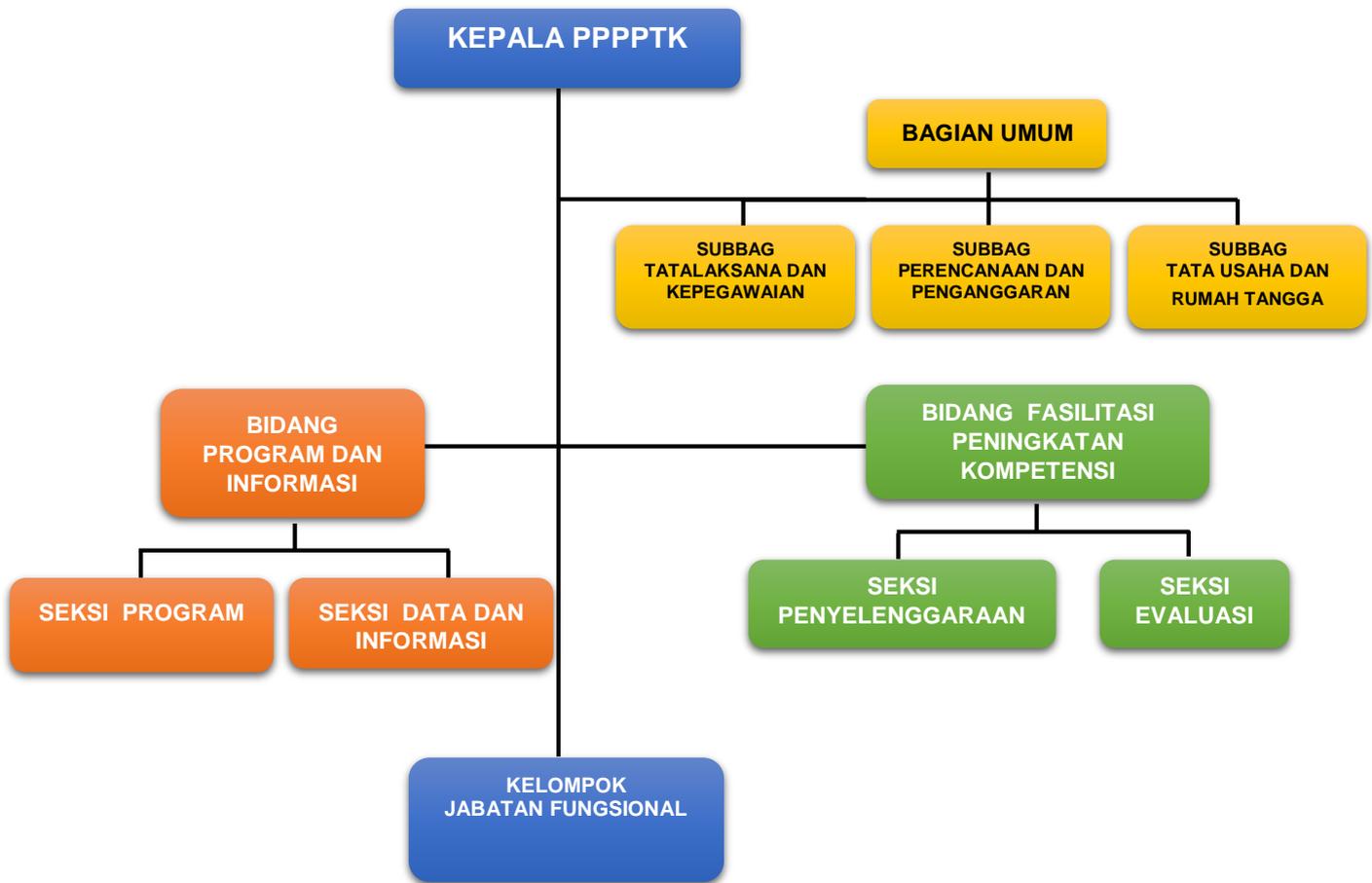
Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), PPPPTK Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugas di atas, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi PPPPTK Pertanian terdiri atas:

1. Kepala
2. Bagian Umum
3. Bidang Program dan Informasi
4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

**Bagan 3.1. Struktur Organisasi PPPPTK  
(Permendikbud No. 16 Tahun 2015)**



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Penetapan target kinerja ditentukan setelah Indikator Kinerja disusun. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPPPTK Pertanian dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan menyebutkan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Target kinerja program Eselon II harus mencerminkan target kinerja instansi vertikal, kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran kerangka anggaran selama lima tahun mendatang. Setelah tersusunnya Renstra ini, PPPPTK Pertanian akan menjabarkannya kedalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Uraian penjelasan dari setiap target kinerja PPPPTK Pertanian adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SSP) dapat diukur dari ketercapaian target IKK.P. Tabel 4.1 dan 4.2 menjabarkan target kinerja PPPPTK Pertanian.

1. TP.1: *Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pertanian*, dapat ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis Lembaga, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis 1 PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019 (kumulatif)**

Sasaran Strategis	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya						
IKK 1: Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya	Orang	11.432	173.917	205.031	243.698	243.783
1) Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian		2.633	20.214	20.618	20.618	20.618
2) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten		8.525	116.901	116.901	116.901	116.901
3) Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik		274	36.802	65.012	65.012	65.012
4) Jumlah Guru yang Mengikuti Diklat Keahlian Ganda		-	-	2.500	2.733	2.818
5) Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013		-	-	-	38.434	38.434
IKK 2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	Orang	1.715	2.020	3.180	4.337	0
1) Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten		205	276	356	480	0
2) Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten		1.510	1.744	2.824	3.857	0

## B. Kerangka Pendanaan

Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan mendasarkan pada perkiraan penganggaran Ditjen GTK, maka PPPPTK Pertanian memperkirakan kerangka anggaran secara menyeluruh sebagai berikut:

### 1. Perkiraan Pendanaan

Perkiraan pendanaan dalam kurun waktu 2015—2019 sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk melaksanakan program dan kegiatan Ditjen GTK yang diampu oleh PPPPTK, didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Perkiraan Kebutuhan Anggaran PPPPTK Pertanian 2015—2019**  
**(dalam Rp. Juta)**

Kode	Program / Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
<b>023.11</b>	<b>Program Guru dan Tenaga Kependidikan</b>						
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	149,76	236,27	248,1	259,25	270,91	1164,29
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4,39	5,53	5,81	6,07	6,39	28,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>154,15</b>	<b>241,8</b>	<b>253,91</b>	<b>265,32</b>	<b>277,3</b>	<b>1192,48</b>

## 2. Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara internal lembaga dan antar instansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal lingkup lembaga.

### a) Koordinasi Perencanaan Program

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra PPPPTK Pertanian dilakukan melalui forum rapat kerja perencanaan internal dan eksternal lembaga. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan antara lain Unit Utama Kemendikbud, Ditjen GTK, PPPPTK, Pemerintah Daerah, SMK Pertanian, dan mitra lainnya.

### b) Tata Kelola

Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja program. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra.

### c) Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari tim pengawasan yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian.

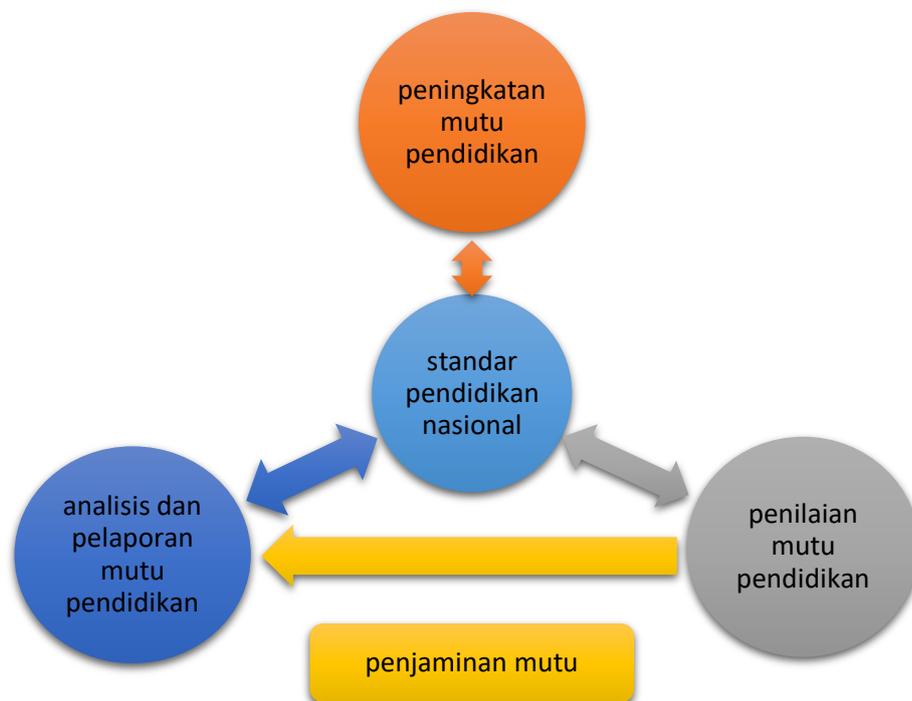
## C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan penjaminan mutu yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Sistem penjaminan mutu bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program secara berkala dan berkelanjutan.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan dengan melalui kegiatan yang diawali dengan perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), pemantauan (*Check*) dan melakukan tindakan perbaikan (*Action*).

Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Bagan 4.1. Penjaminan dan peningkatan mutu



## BAB V PENUTUP

Renstra PPPPTK Pertanian Tahun 2015—2019 revisi tahun 2017 telah disusun melalui berbagai proses dan tahapan. Renstra disusun berlandaskan pada berbagai perkembangan kebijakan, capaian kinerja hingga saat ini, serta hasil analisis kondisi internal dan eksternal untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis PPPPTK Pertanian, yang akan mendukung perwujudan visi Kemendikbud yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Renstra ini juga telah mengakomodasi tugas dan fungsi PPPPTK Pertanian sebagaimana Permendikbud Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

Renstra PPPPTK Pertanian ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah lingkup tugas dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun (2015 hingga 2019) memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, Renstra ini berperan penting untuk menuntun lembaga dalam menyusun (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (3) Penetapan Kinerja (PK); dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akhirnya, semoga Renstra PPPPTK Pertanian periode 2015 – 2019 revisi tahun 2018 dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Pelibatan publik atau keterlibatan aktif banyak pihak dalam kegiatan pembangunan bidang diklat guru dan tenaga kependidikan bidang pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya dan pembangunan bidang pendidikan secara umum selama lima tahun mendatang.

## 1. KETERKAITAN MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

MISI		TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
MP.1	Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian	T.P1	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian
MP.2	Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian		
MP.3	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme dibidang pendidikan dan pertanian		
MP.4	Mewujudkansistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.		

## 2. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<b>T.P1.</b> <b>Terlaksananya</b> <b>pengembangan dan</b> <b>pemberdayaan</b> <b>Pendidik dan Tenaga</b> <b>Kependidikan</b> <b>bidang pertanian</b>	SS1.P1	Peningkatan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan	Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau <i>Continuing Professional Development</i> (CPD)
	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya (pertanian)	Peningkatan peran serta guru dalam penataan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;</li> <li>• penguatan praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah agar mampu melaksanakan kurikulum secara baik;</li> <li>• penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (<i>online</i>) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.</li> </ul>

### 3. SASARAN KEGIATAN DAN TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5634</b>	<b>Kegiatan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>						
<b>SS1.P1.</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya</b>						
<b>IKK.1</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya</b>						
IKK.1.P1	Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian	orang	<b>2.633</b>	<b>20.214</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>
IKK.1.P2	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten		<b>8.525</b>	-	-	-	-
	(kumulatif)		8.525	116.901	116.901	116.901	116.901
IKK.1.P2	Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik		<b>274</b>	<b>30.709</b>	<b>35.542</b>	<b>35.861</b>	<b>36.197</b>
	(kumulatif)		274	30.983	4.559	319	336
IKK.1.P4	Jumlah Guru yang Mengikuti Diklat Keahlian Ganda				<b>2500</b>	<b>233</b>	<b>85</b>
	(kumulatif)		-	-	2.500	2.733	2.818
IKK.1.P5	Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013		-	-	-	<b>38.434</b>	-
	(kumulatif)		-	-	-	38.434	-
<b>IKK.2</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya</b>						
IKK.2.P1	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	orang	<b>205</b>	<b>71</b>	<b>520</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
	(kumulatif)		205	276	356	480	-
IKK.2.P2	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten		<b>1.051</b>	<b>234</b>	<b>1.080</b>	<b>1.033</b>	<b>1.054</b>
	(kumulatif)		1.051	1.744	2.824	3.857	-